

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NIDA NABILAH NURSYA**

**NPM 2111031101**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Oleh**

**NIDA NABILAH NURSYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA AKUNTANSI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Oleh

**NIDA NABILAH NURSYA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan badan usaha milik negara. Pada penelitian ini variabel kecurangan laporan keuangan diukur menggunakan metode Beneish M Score. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan BUMN pada periode 2020 – 2024. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 185 data yang bersumber dari 37 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang bersumber dari website perusahaan maupun website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan badan usaha milik negara.

**Kata Kunci :** *Good Corporate Governance*, Kecurangan Laporan Keuangan

## ***ABSTRACT***

### ***THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON FINANCIAL STATEMENT FRAUD IN STATE-OWNED ENTERPRISES***

*By*

**NIDA NABILAH NURSYA**

*This study aims to determine the effect of good corporate governance, proxied by independent commissioners, audit committees, and institutional ownership, on financial statement fraud in state-owned enterprises. In this study, the financial statement fraud variable was measured using the Beneish M Score method. The population in this study were all state-owned enterprises in the period 2020-2024. The sample in this study used a purposive sampling technique, with a sample size of 185 data sourced from 37 companies that met the sample criteria. The type of data used in this study was secondary data obtained from financial reports sourced from company websites and the Indonesia Stock Exchange website. The analysis technique used was multiple linear regression. The results showed that independent commissioners, audit committees, and institutional ownership did not significantly influence financial statement fraud in state-owned enterprises.*

***Keywords*** : *Good Corporate Governance, Financial Statement Fraud*

Judul Skripsi : **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP KECURANGAN LAPORAN  
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA**

Nama : **Nida Nabilah Nursya**

NPM : **2111031101**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**

NIP. 19710802 199512 2001

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agrianti Komalasari'.

**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**

NIP 19700801 199512 2001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

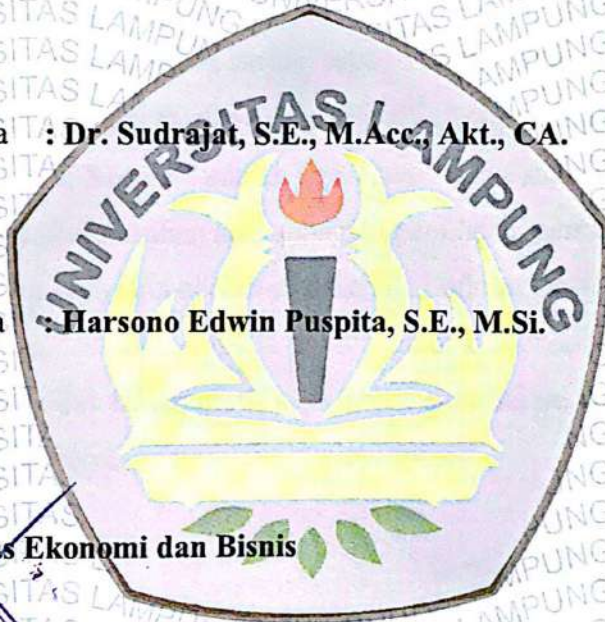
**Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.** .....



**Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.** .....



**Penguji Kedua : Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si.** .....



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19660621 199003 1003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 April 2026**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

**Nama : Nida Nabilah Nursya**

**NPM : 2111031101**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 April 2026

Penulis



**Nida Nabilah Nursya**  
**NPM 2111031101**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nida Nabilah Nursya, lahir di Metro, 12 Maret 2002 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari Alm. Ayahanda Sjamsuddin, S.H. dan Ibunda Nur Aminah, S.Pd. Pendidikan formal penulis dimulai di Taman Kanak-Kanak (TK) Dewi Sartika Metro dan lulus pada tahun 2008.

Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Metro Pusat dan lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Metro dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Metro dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada masa perkuliahan penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan nonakademik. Dalam organisasi kemahasiswaan, penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada Januari 2024 di Desa Ojolali, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Selain itu, penulis mengikuti program magang MoU selama 1 tahun di Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD Lampung) pada Kantor Cabang Metro sebagai frontliner.

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirabbil'alamin**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

**Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

**Kedua orang tua tercinta,**

**Alm. Walidku Sjamsuddin, S.H. dan Mamaku Nur Aminah, S.Pd.**

Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasihat, serta doa yang diberikan walid dan mama tiada hentinya kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa terima kasih atas segala upaya pengorbanan yang telah diberikan walid dan mama hingga saat ini. Atas segala saran, nasihat, dan doa yang selalu menjadi sumber kekuatan penulis dalam setiap langkah.

**Kakakku tercinta Abdul Murad, S.H. dan Adikku tersayang Shafarani Aisya Nurmalia**

Terima kasih atas segala dukungan serta doa yang diberikan kepada penulis hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap proses hidup kita. Aamiin.

**Keluarga Besar dan Teman-teman terbaikku**

Serta

**Almamaterku tercinta, Universitas Lampung**

## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tetapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Walaupun berjalan sedikit lebih lambat tetapi itu tetaplah proses. Sekecil apapun langkahnya tidak akan pernah menjadi sia-sia.”

(Anonim)

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang sangat berharga dalam membantu penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Segala arahan, saran, serta dorongan yang selalu diberikan, bahkan di tengah berbagai kendala yang dihadapi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak.
4. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., selaku Dosen Pembahas Pertama yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas Kedua yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt. dan Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan, serta para staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Cinta pertamaku, Alm. Walid Sjamsuddin, S.H., sosok yang paling penulis rindukan. Berat sekali rasanya anak perempuan ini ditinggal sosok ayah pada saat remaja. Terima kasih banyak lid atas segala cinta, kasih dan sayang, perhatian, pengorbanan, dan segala bentuk tanggung jawab untuk anak perempuanmu ini. Terima kasih telah menjadi semangat terbesar penulis dalam menjalani setiap proses hidup ini. Mohon maaf bila langkahku sedikit lebih lambat kemarin daripada yang lainnya, semoga walid selalu bangga dalam setiap pencapaianku. Jiwa Ragaku, sosok luar biasa yang selalu hadir menyertai setiap langkah anak perempuanmu ini, Mamaku Nur Aminah, S.Pd. terima kasih tak terhingga atas segala cinta, kasih sayang, doa, nasihat, dukungan tiada henti, serta segala upaya pengorbanan yang selalu diberikan kepada anak-anaknya hingga saat ini. Dari beliau, penulis menemukan makna perjuangan yang sesungguhnya, bahwa seorang ibu mampu menguatkan di segala kondisi bahkan jika di saat menjalani kehidupan ini terasa sangat berat. Penulis persembahkan gelar dan karya sederhana ini kepada orang tuaku cinta.
9. Kakakku tercinta, Abdul Murad, S.H., terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan, doa, serta kerja kerasnya dalam membantu memenuhi kebutuhan adik perempuanmu ini saat perjalanan pendidikan ini. Terima kasih telah melanjutkan sosok walid sebagai pelindung, penyemangat, dan penopang di setiap keadaan. Terima kasih telah mengantarkan penulis dalam meraih gelar sarjana ini.
10. Adikku tersayang, Shafarani Aisya Nurmala, terima kasih sudah ikut serta dalam proses perjalanan pendidikan kakakmu ini. Atas segala perhatian,

dukungan, serta doa yang diberikan hingga penyelesaian skripsi ini.

Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat ya adikku.

11. Uncu dan Paksu, terima kasih atas segala bantuan material maupun dukungan moral yang diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan di rantauan ini. Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa hadir dalam perjalanan hidup penulis, terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan doa yang diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita.
12. Sahabat-sahabatku “Mulei” Pina, Hani, Lia, Peli, Dian dan Tiwi, terima kasih selalu setia kebersamai penulis sejak masa SMP hingga saat ini, yang selalu ada di setiap proses perjalanan hidup penulis dalam 8 tahun ini. Terima kasih telah menjadi rumah kedua penulis, selalu siap mendengar keluh kesah, serta selalu memberikan dukungan dan doa di setiap prosesnya. Yang sama-sama sedang berlari menggapai masa depan, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di setiap langkahnya.
13. Sahabat seperjuanganku Aisah dan Devani, terima kasih telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan kuliah penulis. Saat hampir kehilangan arah, kalian selalu membantu untuk tetap percaya. Terima kasih telah mewarnai kisah perkuliahan ini hingga tetap tinggal sampai akhir.
14. Untuk seseorang yang telah hadir menemani proses penulis. Terima kasih telah menjadi pendengar segala keluh kesah penulis, dukungan, dan doa di setiap perjalanan ini. Terima kasih banyak telah menjadi salah satu bagian yang penting dalam proses penulis.
15. Teman-teman Akuntansi 2021, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah perjalanan kuliah ini. Semoga langkah ke depan kita senantiasa disertai hal-hal baik.

Bandar Lampung, 22 April 2026

Penulis

Nida Nabilah Nursya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Agensi .....	9
2.2 <i>Good Corporate Governance</i> .....	10
2.3 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> .....	14
2.3.1 Komisaris Independen .....	14
2.3.2 Komite Audit.....	15
2.3.3 Kepemilikan Institusional .....	17
2.4 Kecurangan Laporan Keuangan.....	18
2.5 Penelitian Terdahulu.....	19
2.6 Kerangka Berpikir.....	22
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	23
2.7.1 Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan .	23
2.7.2 Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan .....	24
2.7.3 Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	26
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	28

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	28
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	29
3.4.1 Variabel Dependen ( Kecurangan Laporan Keuangan).....	29
3.4.2 Variabel Independen.....	32
3.5 Metode Analisis Data .....	33
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	33
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	33
3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda .....	34
3.5.4 Uji Hipotesis .....	35
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi.....	35
3.5.4.2 Uji F .....	35
3.5.4.3 Uji t .....	36
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Deskripsi Data.....	37
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	38
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	41
4.4 Hasil Uji Hipotesis .....	46
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	52
4.5.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	52
4.5.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	54
4.5.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	56
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4. 1 Penentuan Sampel Penelitian .....	37
Tabel 4. 2 Kategori Sampel Kecurangan Laporan Keuangan .....	37
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif (Sebelum <i>Outlier</i> ).....	38
Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif (Setelah <i>Outlier</i> ) .....	38
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas (sebelum outlier) .....	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas (setelah outlier) .....	42
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas.....	43
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	43
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	44
Tabel 4. 11 Hasil Uji Autokorelasi .....	45
Tabel 4. 12 Hasil Uji Autokorelasi.....	46
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	46
Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	47
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefesien Determinasi.....	49
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefesien Determinasi.....	49
Tabel 4. 17 Hasil Uji F .....	49
Tabel 4. 18 Hasil Uji F .....	50
Tabel 4. 19 Hasil Uji t .....	50
Tabel 4. 20 Hasil Uji t .....	51

## DAFTAR GAMBAR

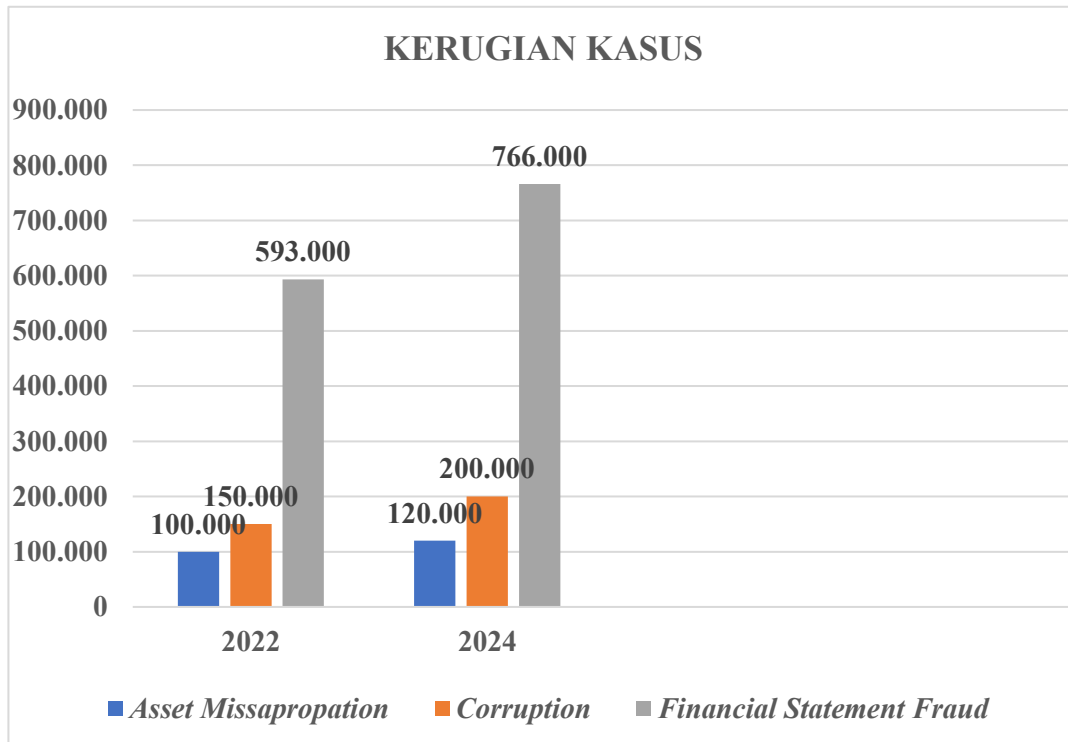
Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Total Kerugian Kasus .....	2
Gambar 1. 2 Persentase Keterjadian Kasus.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	22
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	44
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	45

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

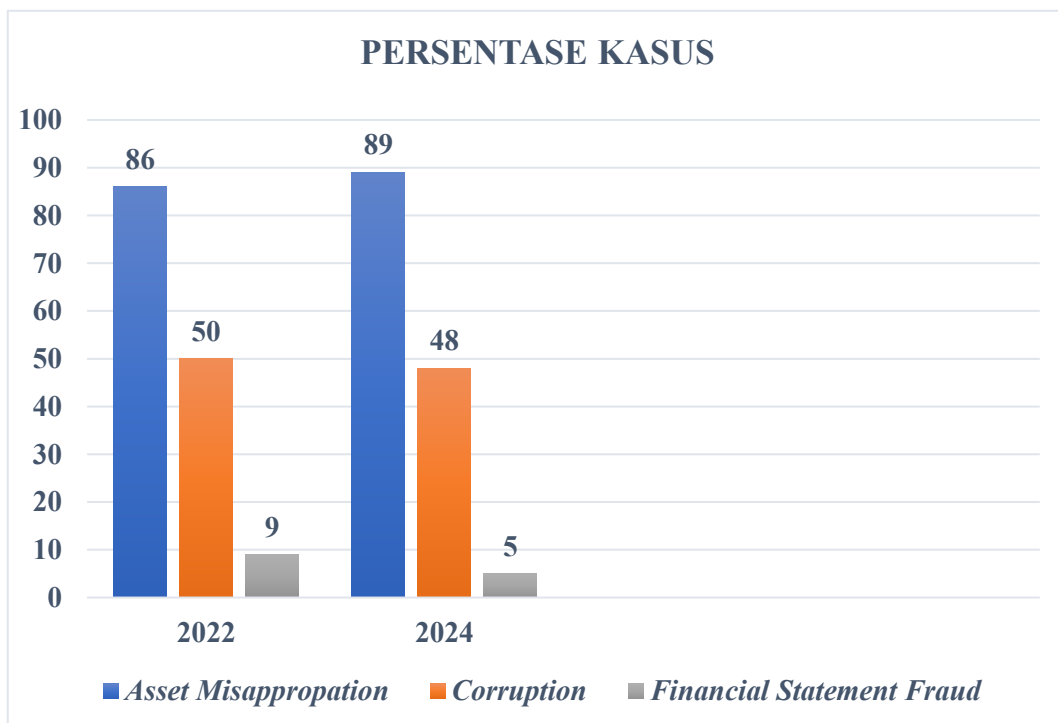
Di dalam dunia bisnis, laporan keuangan memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk sebagian besar pemakai dan pengambil keputusan ekonomi (IAI, 2018). Oleh karena itu, prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan bisnis serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai bentuk penyimpangan terhadap standar yang telah diterapkan. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling merugikan adalah tindakan manipulasi atau kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan ialah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan pengguna informasi dan dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi para pemangku kepentingan (Sari & Husadha, 2020).

Kecurangan laporan keuangan atau dikenal sebagai *financial statement fraud*, masih menjadi salah satu isu global. Menurut laporan yang dirilis oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* pada tahun 2022, *fraud* dalam dunia kerja diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan aset, tindakan korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan laporan ACFE pada tahun 2022, kasus *fraud* kategori kecurangan laporan keuangan merupakan jenis *fraud* yang paling jarang terjadi yaitu sebesar 9% dari kasus-kasus kategori kecurangan yang lainnya. Namun, hal tersebut justru menimbulkan kerugian paling besar yaitu dengan kerugian akibat kecurangan laporan keuangan rata-rata mencapai \$593.000, menjadikannya sebagai jenis *fraud* yang paling merugikan secara ekonomi.



Sumber : ACFE 2020 dan 2024 (Data diolah oleh peneliti)

Gambar 1. 1 Total Kerugian Kasus



Sumber : ACFE 2020 dan 2024 (Data diolah oleh peneliti)

Gambar 1. 2 Persentase Keterjadian Kasus

Kemudian pada tahun 2024, mengungkapkan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan hanya terjadi sebesar 5% dari total seluruh kasus, yang menjadikannya sebagai jenis kasus yang jarang terjadi. Hasil tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan aset sebesar 89% dan tindakan korupsi sebesar 48%. Meskipun demikian, dampak yang ditimbulkan oleh *financial statement fraud* sangat besar yaitu dengan rata-rata mencapai \$766.000. Hal ini menandakan bahwa terjadi kenaikan hampir 30% dibandingkan laporan tahun sebelumnya pada tahun 2022 yang menghasilkan kerugian rata-rata sebesar \$566.000 atau dapat diartikan juga bahwa terjadinya pertambahan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kasus ini. Fakta tersebut mengungkapkan bahwa meskipun dari tingkat kejadian yang relatif rendah, namun fenomena kasus ini tetap memberikan dampak finansial yang sangat besar serta mengancam kredibilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan penguatan integritas serta transparansi dalam laporan keuangan masih menjadi kebutuhan yang mendesak, khususnya bagi perusahaan di sektor BUMN yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.

Di Indonesia, berdasarkan hasil survei nasional *Fraud Risk Management* (FRM) yang dilakukan oleh IIA Indonesia bersama ACFE Indonesia pada oktober – november 2022, diperoleh hasil survei yang dikelompokkan berdasarkan jenis organisasinya. Dalam hasil survei kategori kecurangan laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa BUMN/BUMD, menjadi organisasi dengan tingkat kasus kecurangan laporan keuangan tertinggi sebesar 40%, dibandingkan dengan perusahaan swasta sebesar 33% dan perusahaan sektor publik sebesar 27%. Temuan ini mengungkapkan kerentanan signifikan di sektor BUMN terhadap praktik kecurangan dalam laporan keuangan, yang berpotensi mengancam stabilitas finansial perusahaan dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan publik.

Kemudian pada tahun 2025, berdasarkan temuan survei *fraud* Indonesia yang dipublikasikan oleh ACFE Indonesia, terungkap bahwa kasus *financial*

*statement fraud* mencapai 40,2%, kondisi ini menjadikan jenis penipuan kedua terbanyak setelah kasus korupsi. Meskipun frekuensi kejadiannya tidak setinggi kasus korupsi, dampak kerugian yang diakibatkan oleh kasus kecurangan laporan keuangan tetap tergolong besar. Menurut data dari survei tersebut, kerugian rata-rata per kasus *financial statement fraud* berada di kisaran lebih dari Rp1 miliar hingga Rp50 miliar, dengan persentase sebesar 23,74%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan memiliki dampak ekonomi yang besar. Selain itu, berdasarkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh *fraud* pada berbagai jenis organisasi seperti, BUMN dengan kerugian pada rentang yang sama sebesar 25,90% dibandingkan perusahaan swasta sebesar 22,78%. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut dengan skala operasional besar khususnya pemerintahan dan BUMN, memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap *fraud* dari segi jumlah kasus maupun besarnya kerugian yang dihasilkan.

Fenomena kecurangan dalam laporan keuangan di Indonesia terus menjadi sorotan publik, khususnya pada perusahaan BUMN dalam menopang struktur ekonomi nasional. BUMN sebagai perusahaan yang mengelola aset publik, diharapkan menjadi contoh dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tersebut, yang tercermin dari sejumlah kasus penyimpangan pelaporan keuangan yang melibatkan beberapa perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan BUMN seperti pada kasus PT Indofarma Tbk, dimana BPK mengungkapkan adanya sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan selama periode 2020-2023. Temuan ini meliputi pembengkakan persediaan, manipulasi transaksi dan pencatatan fiktif yang secara keseluruhan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar (Kaltim.bpk.go.id, 2024). Selain itu, kasus besar juga terjadi oleh PT Timah Tbk yang terungkap pada tahun 2024, yang dalam kasus ini perusahaan diduga melakukan manipulasi data, salah satunya yaitu mengubah rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pada tahun 2019 (Tempo.co, 2024).

Tidak berhenti disitu, pada tahun 2025 PT Telkom turut menjadi perhatian publik setelah diketahui melakukan pembiayaan fiktif senilai Rp431,7 miliar yang melibatkan empat anak perusahaan telkom. Dalam kasus ini melibatkan kerja sama dengan sembilan perusahaan swasta untuk melaksanakan proyek-proyek yang ternyata fiktif, dengan dana yang berasal dari anggaran Telkom (Tempo.co, 2025). Kasus serupa yang terjadi di sektor konstruksi pada kasus dugaan kecurangan pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, hasil temuan BPK mengidentifikasi adanya indikasi rekayasa laporan keuangan selama periode 2018 – 2021, adanya praktik akuntansi yang tidak wajar ini dilakukan untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya, seperti mencatat pendapatan fiktif, penundaan pengakuan beban, serta pengakuan aset yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi (Kompasiana.com, 2024). Rentetan kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik *fraud* dalam BUMN masih menjadi tantangan serius yang dapat mengganggu integritas keuangan negara. Kondisi ini menggambarkan bahwa penerapan prinsip serta peran struktur GCG di lingkungan BUMN masih belum optimal.

*Good Corporate Governance* merupakan sistem untuk mengatur dan mengontrol perusahaan yang mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan guna mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan nilai perusahaan (KNKG, 2006). Tata kelola perusahaan yang baik ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER 2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik di BUMN. Regulasi tersebut menekankan perlunya penerapan GCG untuk menghindari penyimpangan, termasuk kecurangan dalam laporan keuangan. GCG mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, mengurangi risiko *fraud*, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan maupun publik. Hal ini selaras dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976, yang mengungkapkan bahwa potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, dimana manajer yang diberi kuasa mengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih luas daripada pemilik, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat. Guna mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya kerangka struktural serta implementasi

GCG yang kokoh. Penerapan sistem tata kelola perusahaan untuk membentuk mekanisme pengendalian internal yang efektif, sehingga mampu meminimalisir risiko terjadinya manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang meneliti hubungan antara mekanisme GCG seperti dewan komisaris, komite audit, serta kepemilikan institusional dengan kecurangan laporan keuangan menghasilkan temuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Fahira dan rekan-rekannya (2023) mengungkapkan bahwa penerapan GCG tidak memiliki dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan *fraud* di PT Barru Barakah Properti, melainkan audit internal memiliki peran utama dalam menghindari penyimpangan. Penelitian lain mengungkapkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, sementara dewan komisaris tidak memiliki pengaruh (Indrati *et al.*, 2021). Temuan serupa juga yang mengungkapkan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, namun dewan komisaris tidak memiliki pengaruh (Amri dan Putri, 2023). Di sisi lain, penelitian lain yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, namun aktivitas komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Tan Chairi, 2022). Adapun penelitian lain mengungkapkan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, tetapi dewan komisaris tidak berpengaruh (Nindito *et al.*, 2025).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme GCG seperti dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dapat dimanfaatkan sebagai strategi pencegahan terhadap berbagai bentuk kecurangan dalam laporan keuangan (Sunaryo *et al.*, 2019). Dalam hal ini, komisaris independen yang berperan melakukan pemantauan terhadap kinerja dan kebijakan yang dijalankan oleh manajemen, komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan, sementara kepemilikan institusional yang

dipercaya mampu meningkatkan akuntabilitas serta memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil selaras dengan seluruh pemangku kepentingan.

GCG bukan sekadar alat pengawasan, tetapi berperan sebagai “penjaga integritas” dalam sistem pelaporan keuangan, hal tersebut menekankan pentingnya keterlibatan aktif dewan pengawas, efektivitas komite audit, dan budaya perusahaan yang mendukung transparansi sebagai pilar utama dalam mencegah *fraud* (Nindito *et al.*, 2025). Kinerja GCG yang kuat secara signifikan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan, hal tersebut menyoroti pentingnya efektivitas dewan direksi, independensi auditor, dan sistem pengendalian internal sebagai komponen penting dalam mengurangi risiko fraud dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasir & Hashim, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, serta melihat berbagai fenomena kasus kecurangan laporan keuangan serta hasil penelitian terdahulu yang beragam atau inkonsisten, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai **“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun 2020 - 2024 ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun 2020 - 2024 ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun 2020 - 2024 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, berikut tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun 2020 - 2024.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun 2020 - 2024.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun 2020 - 2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

##### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta kajian akademik mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kecurangan laporan keuangan, khususnya pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori agensi serta tata kelola perusahaan.

##### **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi manajemen BUMN dalam memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki struktur tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para pemangku kepentingan dalam pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif di sektor BUMN.

##### **C. Manfaat Sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN dan institusi pemerintah lainnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 yang mengungkapkan mengenai hubungan antara *principal* sebagai pihak yang memiliki perusahaan dengan *agent* sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan. Teori ini menekankan pada fakta yang terus berkembang bahwa dalam setiap organisasi, selalu ada pihak yang berperan sebagai *agent* yang bertugas mewakili kepentingan pihak lain yang dikenal dengan istilah *principal* (Lukviarman, 2016). Dalam praktiknya, hubungan ini masih sering menimbulkan konflik yang dimana konflik tersebut disebabkan oleh *moral hazard*. *Moral hazard* ialah situasi dimana *agent* yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pihak *principal*.

Kondisi tersebut muncul karena adanya kesenjangan akses informasi antara kedua pihak, yaitu *principal* yang berperan sebagai pemilik perusahaan dan *agent* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional perusahaan. Pihak yang mengelola perusahaan memiliki akses terhadap informasi internal yang lebih luas dibandingkan dengan pemilik. Keunggulan informasi ini membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan demi kepentingan pribadi daripada kepentingan pemilik perusahaan. Konflik keagenan tersebut dapat diuraikan melalui tiga asumsi dasar sifat manusia yang dikemukakan oleh Eisenhardt pada tahun 1989, diantaranya :

1. *Self-interest*, menunjukkan bahwa individu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya.

2. *Bounded rationality*, menjelaskan bahwa kemampuan manusia dalam mengolah informasi bersifat terbatas.
3. *Risk aversion*, menunjukkan bahwa *agent* cenderung menghindari risiko dibandingkan *principal*.

Berdasarkan asumsi yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa manajer cenderung memprioritaskan kepentingan dan keuntungan pribadi, yang mana hal ini dapat merugikan kepentingan *principal* sebagai pemilik. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan keagenan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Akibat dari konflik kepentingan tersebut timbul *agency cost* sebagai konsekuensi hubungan keagenan. Penelitian oleh Jensen & Meckling tahun 1976 menegaskan bahwa *moral hazard* ialah salah satu bentuk *agency cost*, yaitu biaya yang muncul sebagai akibat dari adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Biaya ini dapat berbentuk biaya langsung seperti biaya pengawasan dan biaya tidak langsung seperti kerugian dari pengambilan keputusan yang menyimpang. Dalam praktiknya, salah satu bentuk *moral hazard* yang sering terjadi ialah *financial statement fraud* dimana manajer menyajikan informasi yang menyesatkan demi kepentingan tertentu. Teori agensi memberikan wawasan tentang mekanisme pengawasan yang memiliki peran penting dalam mengurangi konflik antara *principal* dan *agent*. Teori ini dipakai sebagai pondasi untuk membahas fenomena bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap praktik manipulasi dalam laporan keuangan (Hendrastuti 2022).

## **2.2 Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk mengarahkan serta mengawasi terhadap operasional perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan guna mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan nilai perusahaan (KNKG, 2006). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang pedoman

tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan bagi BUMN. Ini mencakup ketentuan umum, prinsip tata kelola, dan penerapan manajemen risiko. Tujuan utama dalam aturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, memastikan bahwa BUMN beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas, serta mendorong praktik bisnis yang baik dan berkelanjutan.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) *good corporate governance* ialah sebuah sistem yang mencakup serangkaian hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Dalam teori agensi, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berfungsi sebagai alat atau instrumen yang efektif dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Dalam praktiknya, manajemen seringkali cenderung mengutamakan kepentingan individu mereka, oleh karenanya diperlukan adanya sistem pengawasan yang optimal melalui implementasi GCG. GCG sebagai instrumen yang penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara pihak pengelola dan pemilik perusahaan, dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan akan selaras dengan tujuan dari para investor (Wardoyo *et al.*, 2022).

Peran dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam upaya pencegahan tindak manipulasi oleh pihak manajemen dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan yang kurang baik dapat menyebabkan munculnya praktik kecurangan dalam laporan keuangan, sebaliknya apabila penerapan GCG dijalankan dengan baik dan optimal, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif dalam upaya meminimalisir tindakan kecurangan dalam laporan keuangan (Wicaksono, 2015). Secara khusus pada perusahaan BUMN, GCG memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjaga integritas pengelolaan aset negara. BUMN tidak hanya memiliki tanggung jawab sebagai entitas bisnis saja tetapi juga sekaligus agen pembangunan negara, sehingga diperlukan tata kelola yang kuat dan berintegritas. Penerapan GCG di

BUMN mampu mencegah konflik kepentingan yang timbul akibat campur tangan politik atau nepotisme, serta memperkuat profesionalisme dalam pengambilan keputusan (Wardoyo *et al.*, 2022).

Tujuan utama GCG pada BUMN untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik, dan mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik penyalahgunaan wewenang. Struktur GCG yang baik di BUMN dapat menekan praktik kecurangan, menjaga kualitas pelaporan keuangan, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap pemerintah dan publik (Suaryana, 2023). Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) memiliki beberapa prinsip yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 meliputi :

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan mengenai peran, struktur organisasi, sistem operasional, serta kewajiban pertanggungjawaban dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Prinsip ini menuntut adanya sistem yang memastikan bahwa setiap bagian perusahaan seperti dewan komisaris, komite audit, serta pemilik saham memiliki peran yang jelas, saling mengawasi, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan wewenangnya. BUMN harus memiliki ukuran kinerja yang sejalan dengan visi misi, serta memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan etis.

#### 2. Transparansi

Transparansi memiliki arti bahwa perusahaan wajib menyampaikan informasi yang bersifat penting serta memiliki pengaruh terhadap kondisi perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan secara tepat waktu, dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Transparansi mencakup penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan, aspek manajemen, struktur kepemilikan, serta hal penting lainnya yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh para investor, lembaga kreditor, kalangan masyarakat, serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Hal tersebut berarti, perusahaan harus menyediakan laporan keuangan, kebijakan,

dan keputusan penting secara jelas dan mudah diakses. Dengan transparansi, diharapkan dapat mengurangi adanya manipulasi informasi yang dapat merugikan pihak tertentu serta membangun kepercayaan publik terhadap BUMN.

### 3. Responsibilitas

Responsibilitas adalah prinsip tanggung jawab perusahaan untuk menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya dengan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, regulasi yang telah ditetapkan, serta prinsip-prinsip etika dan standar norma yang diakui, baik dalam negeri maupun di internasional. Prinsip ini juga mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan, termasuk dalam menjaga etika bisnis, perlindungan tenaga kerja, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

### 4. Independensi

Independensi atau kemandirian ialah prinsip yang memastikan perusahaan dijalankan secara profesional oleh pengelola yang bebas dari campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai GCG. Perusahaan dituntut untuk tidak terpengaruh oleh tekanan atau intervensi dari luar maupun dalam organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas serta menurunkan kualitas keputusan yang diambil oleh manajemen, baik dalam perencanaan strategis maupun pengawasan kegiatan operasional. Prinsip ini menjadi pondasi untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan langkah yang ditetapkan perusahaan merupakan pilihan yang paling optimal bagi kemajuan bisnis maupun bagi para pemangku kepentingan serta perlunya batasan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif bukan dipengaruhi oleh keuntungan pribadi pihak tertentu.

### 5. Kewajaran

Kewajaran adalah kesetaraan dalam memberikan hak dan kewajiban kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik itu kepada para pemegang saham, karyawan, maupun masyarakat. Perusahaan harus memberikan hak-hak sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang berlaku, termasuk kepada pemilik saham

minoritas, tenaga kerja, mitra bisnis, serta masyarakat di lingkungannya. Hal tersebut dapat mengartikan bahwa BUMN harus menghindari diskriminasi serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Pada prinsip kewajaran ini mencakup pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadi atau satu pihak saja.

Pada dasarnya, *Good Corporate Governance* dirancang untuk membangun sistem pengelolaan perusahaan yang sehat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berkelanjutan dalam menambah nilai bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Pengimplementasian prinsip-prinsip GCG meliputi akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi sangat penting dalam memperkuat kepercayaan para investor serta meminimalisir risiko penipuan ataupun manipulasi laporan keuangan. GCG berpengaruh besar dalam mempertahankan integritas laporan keuangan serta mengoptimalkan kinerja operasional perusahaan melalui mekanisme pengawasan yang efektif (Yulinda & Ridwan, 2020).

### **2.3 Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme *Good Corporate Governance* mencakup seperangkat aturan untuk mengendalikan serta mengawasi kegiatan perusahaan, dengan melibatkan unsur-unsur seperti komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.

#### **2.3.1 Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki ikatan hubungan afiliasi atau kepentingan langsung dengan perusahaan, manajemen, atau pemegang saham utama, oleh karena itu mereka dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara netral atau tidak memihak (Sembiring & Zulvia, 2021). Komisaris independen menempati posisi yang penting dalam struktur GCG, dengan lingkup tugas dan wewenang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 yang mengatur mengenai direksi dan dewan komisaris

emiten maupun perusahaan publik. Tujuan utamanya memastikan bahwa pengawasan terhadap kinerja manajemen berjalan secara netral, sehingga dapat mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance*. Komisaris independen wajib mengawasi kinerja direksi dalam mengelola perusahaan dan menjamin terciptanya keterbukaan informasi serta pengungkapan laporan keuangan yang akurat (Hasnawati Zainal, 2022).

Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan serta efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, yang berguna untuk meminimalkan risiko terjadinya berbagai bentuk kecurangan maupun penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Keberadaan komisaris independen memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam menjaga integritas laporan keuangan melalui peran pengawasan yang dijalankan secara optimal (Halasanni Agustina Pardede & Dea Annisa, 2023). Efektivitas penerapan *good corporate governance* sangat ditentukan oleh kualitas keahlian keuangan yang dimiliki. Kurangnya keahlian keuangan dapat melemahkan fondasi dan daya kerja mekanisme tata kelola perusahaan (Christian *et al.*, 2019).

Komisaris yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang aspek keuangan, mereka menjadi rentan terhadap manipulasi informasi yang disajikan oleh manajemen. Minim akan kemampuan keahlian keuangan di antara anggota dewan dapat membatasi kapabilitas dalam mengawasi jalannya proses pelaporan keuangan, menganalisis potensi risiko keuangan, serta menjamin keaslian dan keterpercayaan terhadap laporan keuangan (Pinto dos santos, 2021). Laporan keuangan yang semestinya menampilkan kondisi perusahaan secara valid dan objektif dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang akan menyebabkan kerugian perusahaan serta dapat menyebabkan konflik pada pemangku kepentingan.

### **2.3.2 Komite Audit**

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik, komite audit yang memiliki peran strategis dalam memantau proses

penyusunan laporan keuangan, mengevaluasi keefektifan sistem pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap berbagai ketentuan dan standar yang berlaku (Puspitasari & Meiranto, 2020). Para anggota komite audit dituntut untuk memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai di bidang akuntansi dan keuangan, memahami dengan baik tahapan proses audit dan mekanisme pelaporan keuangan, serta berkomitmen terus meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan (Rahmawati & Yulianto, 2021). Di samping itu, komite audit juga memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit internal maupun auditor eksternal perusahaan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur mengenai pembentukan serta pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi komite audit.

Keefektifan komite audit dalam melaksanakan perannya secara optimal mampu meningkatkan mutu laporan keuangan melalui pemantauan ketat terhadap prosedur pelaporan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Ritonga *et al.*, 2023). Keberadaan komite audit dapat memberikan pengaruh yang baik bagi keberlangsungan bisnis, antara lain meliputi peningkatan integritas laporan keuangan, meminimalisir potensi terjadinya berbagai bentuk kecurangan, serta terciptanya suasana kerja yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, jika keberadaan komite audit tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan dan berdampak luas. Situasi tersebut membuktikan bahwa komite audit harus memiliki integritas serta kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Sebagaimana diatur dalam ISA 240 yang membahas kewajiban auditor dalam menangani kecurangan saat audit laporan keuangan, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan setiap bentuk kecurangan dalam laporan keuangan.

### 2.3.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh berbagai lembaga atau institusi yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Kepemilikan ini didasarkan pada kepentingan institusi untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan sesuai dengan standar serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Widianingsih & Setiawan, 2020). Badan-badan institusi pada umumnya memiliki berbagai sumber daya yang memadai, memiliki keahlian khusus, serta memiliki kepentingan investasi yang berorientasi jangka panjang. Kondisi ini mendorong manajemen untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak pada nilai perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan hubungan berbanding terbalik dengan peluang terjadinya praktik kecurangan dalam laporan keuangan, dimana institusi memiliki kecenderungan untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap manajemen (Suryaningrum *et al*, 2023).

Kepemilikan institusional diharapkan memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip tata kelola, laporan keuangan, dan risiko yang melekat dalam operasional perusahaan. Selain itu, penerapan standar internal yang ketat serta memberikan motivasi kepada seluruh jajaran untuk mematuhi berbagai regulasi yang berlaku, termasuk peraturan akuntansi, ketentuan pasar modal, dan prinsip tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional yang signifikan dapat memperkuat pengawasan eksternal dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan memberikan tekanan pada manajemen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Struktur kepemilikan institusional yang kuat mampu menekankan perilaku manajerial oportunistik dalam penyusunan laporan keuangan (Arum *et al.*, 2023).

Namun, dalam praktiknya, kepemilikan institusional juga dapat menjadi tidak efektif jika pemegang saham institusional bersikap pasif atau memiliki konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Minimnya keterlibatan institusional dalam fungsi pengawasan dapat menurunkan efektivitas tata kelola

perusahaan secara keseluruhan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas keuangan perusahaan. Dengan demikian, pemilik saham yang berasal dari institusi harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap prinsip GCG serta berperan aktif dalam menjalankan tugas pengawasan.

#### **2.4 Kecurangan Laporan Keuangan**

Dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis seperti perusahaan atau organisasi dalam kurun waktu tertentu dikenal dengan istilah laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki fungsi utama untuk menyajikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan (IAI, 2018). Tidak hanya sebagai sumber informasi, laporan keuangan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan (Siregar *et al.*, 2022). Dalam upaya menampilkan performa perusahaan yang optimal, manajemen terkadang mengambil jalan pintas yang tidak baik, seperti memanipulasi laporan keuangan untuk memberikan kesan positif kepada pemangku kepentingan. Praktik semacam ini dapat merusak integritas perusahaan dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang (Rumapae *et al.*, 2022).

ACFE mengartikan kecurangan laporan keuangan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja dengan cara menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Penyajian ini dilakukan dengan memanipulasi angka, menghilangkan atau penghapusan data, atau menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan. Kecurangan ini bertujuan untuk menciptakan persepsi di mata publik bahwa kondisi finansial perusahaan berada dalam kondisi yang lebih positif atau lebih buruk dari kondisi sebenarnya, guna mencapai kepentingan tertentu. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan yang paling merugikan bagi perusahaan, para investor, maupun masyarakat umum. Meskipun frekuensi terjadinya kecurangan laporan keuangan relatif rendah dibandingkan dengan berbagai bentuk penipuan lainnya, namun

besaran dampak kerugian finansial yang ditimbulkan justru termasuk paling besar dan merugikan bagi perusahaan.

Kecurangan laporan keuangan memiliki keterkaitan yang kuat dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu perusahaan. Prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan efektif dapat mengurangi peluang manipulasi laporan keuangan (Dewi & Utama, 2022). Lemahnya implementasi GCG dapat menciptakan celah bagi manajemen untuk melakukan kecurangan tanpa adanya pengawasan yang ketat (Beasley, 1996). Oleh karena itu, dengan adanya prinsip transparansi, perusahaan diwajibkan untuk menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada publik sehingga memudahkan berbagai pihak berkepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan yang efektif dapat tercapai melalui keikutsertaan aktif dewan komisaris dan komite audit yang berperan strategis dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan (Prasetyo & Santoso, 2021).

Berbagai metode analisis yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebagai upaya dalam mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan. Diantara metode-metode tersebut, Beneish M-Score merupakan salah satu teknik yang banyak diterapkan oleh peneliti. Metode Beneish M-Score didesain untuk memprediksi potensi kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara menganalisis berbagai rasio keuangan (Beneish, 2012). Nilai M Score jika lebih besar dari -2,22 mengartikan bahwa laporan keuangan terindikasi melakukan kecurangan, sedangkan jika nilai M Score kurang dari -2,22 mengartikan bahwa laporan keuangan tidak terindikasi melakukan kecurangan. Nilai M score didapatkan dari perhitungan 8 rasio keuangan metode Beneish M score. Perubahan kondisi keuangan yang tercermin dalam rasio-rasio tersebut dapat menjadi indikator adanya praktik manipulasi.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

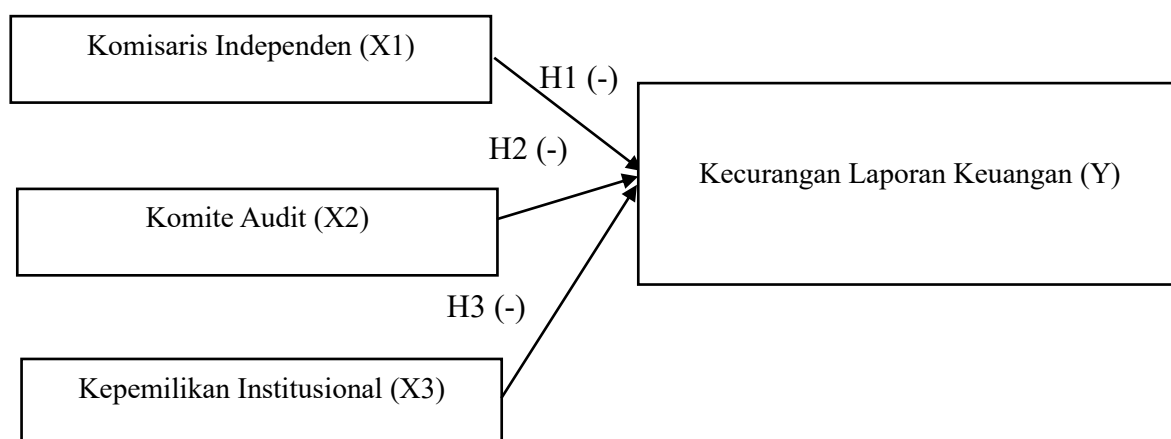
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Nindito, M., Avianti, I., Koeswayo, P. S., & Tanzil, N. D. (2025) Q4	<i>Guardians of integrity: Exploring the role of corporate governance in preventing financial statement fraud.</i> (Perusahaan yang dikenakan sanksi oleh OJK tahun 2019-2021)	Variabel X = Frekuensi rapat komite audit, komisaris independen, dewan komisaris perempuan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keterlibatan dengan empat besar firma akuntansi publik /non-empat besar, kapitalisasi pasar Variabel Y = kecurangan laporan keuangan (FSF)	Temuan ini mengungkapkan bahwa variabel frekuensi rapat komite audit serta kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (FSF), sedangkan 5 variabel lainnya tidak memiliki pengaruh.
Anisykurlillah, I., et al. (2025) Q2	<i>Audit committee attributes and Financial Statement Fraud Risk: evidence from Indonesian Banks</i>	Variabel X = Karakteristik komite audit (ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan, frekuensi rapat komite audit ) Variabel Y = <i>Financial Statement Fraud Risk</i>	Temuan ini mengungkapkan bahwa keahlian komite audit menurunkan risiko fraud secara signifikan, independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap fraud risk, frekuensi rapat membantu meningkatkan pengawasan (mengurangi fraud risk).
Indiraswari, S.D., Subroto, B., & Rosidi (2025) Q2	<i>Corporate Governance and Financial Statement Fraud: Evidence on the Moderating Influence of Financial Distress</i>	Variabel X = komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional Variabel Y = <i>financial statement fraud</i> Variabel Moderating = <i>financial distress</i>	Temuan ini mengungkapkan bahwa variabel corporate governance dapat menurunkan atau mengurangi fraud , tetapi efeknya akan lebih kuat jika perusahaan mengalami tekanan keuangan <i>financial distress</i>

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Probohudono, A.N., Lubis, A.T., & Arifah, S. (2022) S2	<i>Governance structure and the tendency to do financial statement fraud</i>	Variabel X = usia direksi, latar belakang pendidikan direksi, gender direksi, kepemilikan manajerial, keberadaan komisaris independen Variabel Y = kecurangan laporan keuangan	Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa usia direksi, gender direksi, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya variabel tersebut dapat mengurangi atau menurunkan <i>fraud</i>
Nasir, N. A. M., & Hashim, H. A. (2021) Q3	<i>Corporate governance performance and financial statement fraud: Evidence from Malaysia</i>	Variabel X = praktik <i>corporate governance</i> Variabel Y = kecurangan laporan keuangan (FSF)	Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel praktik <i>corporate governance</i> memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya peningkatan dalam praktik <i>corporate governance</i> perusahaan di Malaysia dapat mengurangi risiko terjadinya penipuan laporan keuangan
Ali, Nasir & Ahmad (2019) Q2	<i>Corporate governance, board ethnicity and financial statement fraud : evidence from malaysia</i>	Variabel X = Proporsi direktur Melayu, proporsi direktur independen, jumlah rapat dewan, jumlah rapat komite audit, <i>dualitas CEO-chairman</i> , keahlian direktur, <i>outsourcing audit internal</i> Variabel Y = Kecurangan laporan keuangan (FSF)	Proporsi direktur Melayu memiliki pengaruh positif signifikan dengan kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang melakukan fraud meningkatkan proporsi direktur independen, frekuensi rapat dewan dan komite audit, serta mengurangi <i>dualitas</i> setelah terjadinya fraud. <i>Outsourcing audit internal</i> meningkatkan risiko FSF.

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Kaawaase, T.K., Nairuba, C., Akankunda, B., & Bananuka, J. (2021) Q2	<i>Corporate governance, internal audit quality and financial reporting quality of financial institutions</i>	Variabel X = keahlisan dewan, independensi dewan, kinerja peran dewan, kualitas audit internal Variabel Y = Kualitas pelaporan keuangan	Temuan ini mengungkapkan bahwa keahlisan dewan, kinerja peran dewan, dan kualitas audit internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Meskipun independensi dewan tidak memiliki pengaruh signifikan.
Ulum & Suryatimur (2022) S3	Peran sistem pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> dalam upaya pencegahan fraud	Variabel X = sistem pengendalian internal, <i>good corporate governance</i> Variabel Y = pencegahan fraud	Sistem pengendalian internal serta GCG memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. GCG yang diterapkan secara etis dan pengendalian internal yang efektif dapat menutup celah terjadinya fraud.

## 2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir60

Kerangka berpikir pada penelitian ini menjelaskan bahwa variabel *good corporate governance* yang di proksikan oleh komisaris independen (X1)

berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Y), karena keberadaan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih independen dan objektif, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Komite audit (X2) berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Y), karena komite audit memiliki peran mengawasi proses pelaporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Selain itu, kepemilikan institusional (X3) berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Y), karena investor institusional memiliki kemampuan, sumber daya, dan insentif yang lebih besar untuk melakukan monitoring secara ketat terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan oportunistik berupa kecurangan laporan keuangan.

## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Komisaris independen dalam struktur GCG memiliki posisi yang strategis, salah satunya ialah berfungsi sebagai pengawas yang menjamin bahwa seluruh kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh pihak manajemen selaras dengan kepentingan para pemilik saham serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976, yang menjelaskan bahwa hubungan antara manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* kerap memicu timbulnya pertentangan kepentingan. Pemicu utamanya ialah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak, dimana pihak manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dan menyeluruh terhadap informasi internal perusahaan dibandingkan dengan para pemilik saham. Manajemen sebagai *agent* cenderung memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan pribadi, termasuk melakukan manipulasi laporan keuangan guna mempertahankan reputasi, bonus, ataupun target kinerja tertentu.

Dalam hal ini, kehadiran komisaris independen menjadi alat pengendali penting yang berfungsi untuk mengurangi konflik keagenan tersebut melalui peningkatan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas manajerial. Keberadaan komisaris independen dalam jumlah yang lebih banyak dalam struktur, dapat memperkuat sistem pengawasan internal. Komposisi tersebut mampu meningkatkan standar tata kelola perusahaan secara keseluruhan, sehingga potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan dapat diminimalisir (Setiawan *et al.*, 2023). Selain itu juga, keberadaan komisaris independen yang terbebas dari ikatan kepentingan dengan pihak manajemen dapat memperkuat fungsi pengawasan secara lebih netral atau tidak memihak. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dapat memperkuat sistem pengawasan internal yang diterapkan dalam perusahaan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang mendukung terhadap argumen penelitian ini mengungkapkan bahwa, peningkatan proporsi komisaris independen mampu mengurangi tingkat manipulasi dalam laporan keuangan atau dapat diartikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Tan *et al.*, 2022). Temuan serupa juga ditemukan bahwa komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Mulyadi *et al.*, 2020). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan atau kehadiran komisaris independen yang kuat merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang sehat serta mencegah tindakan kecurangan. Berdasarkan teori agensi serta didukung oleh hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan

### **2.7.2 Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Dalam *good corporate governance*, komite audit memiliki posisi penting dalam menjamin keandalan dan ketepatan informasi keuangan melalui pengawasan terhadap prosedur audit serta proses pelaporan yang dilakukan

perusahaan. Selain fungsi pengawasan, komite audit juga memiliki kewajiban mengenai evaluasi terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, serta menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan dan asimetri informasi menyebabkan *agent* cenderung memanfaatkan keunggulan informasinya untuk kepentingan pribadi, termasuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Keberadaan komite audit berfungsi sebagai penyeimbang informasi yang diterima oleh *principal* melalui pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan, peninjauan laporan secara objektif, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan, andal, dan sesuai standar pelaporan. Dengan pengawasan yang efektif, komite audit mampu meminimalkan peluang terjadinya manipulasi yang dapat merugikan pemegang saham.

Komite audit memegang peran penting dalam menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta integritas dalam proses penyajian laporan keuangan kepada berbagai pihak. Fungsi tersebut diwujudkan melalui evaluasi kinerja manajemen, pengawasan terhadap auditor eksternal, serta memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material maupun unsur kecurangan. Komite audit yang independen dan memiliki keahlian memadai memungkinkan dilakukannya evaluasi secara mendalam dan objektif terhadap informasi finansial yang disajikan oleh pihak manajemen. Maka dari itu, komite audit menjadi instrumen pengendalian internal yang efektif dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Berbagai penelitian sebelumnya memberikan hasil yang mendukung argumen penelitian ini mengungkapkan bahwa, efektivitas komite audit yang diukur melalui keahlian dan kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Kusumosari & Rahardjo, 2023). Artinya, semakin kuat fungsi komite audit maka akan semakin rendah potensi terjadinya praktik *financial statement fraud*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang mengungkapkan bahwa, keberadaan komite audit mampu mengurangi tingkat kecurangan dalam laporan keuangan atau dapat diartikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Wijaya *et al.*, 2023).

Dengan demikian, keberadaan dan aktivitas komite tidak hanya memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan saja, tetapi juga

berfungsi sebagai mekanisme strategis dalam meminimalisir terjadinya konflik keagenan antara pihak manajemen dan pemilik saham melalui peningkatan keterbukaan informasi, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan teori agensi serta hasil yang diperoleh penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan

### **2.7.3 Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh berbagai institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Dalam *good corporate governance*, keberadaan kepemilikan institusional sangat penting, mereka tidak hanya memiliki pengaruh ekonomi terhadap performa perusahaan, melainkan juga membawa kemampuan analitis untuk mengawasi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, peran kepemilikan institusional merupakan salah satu hal yang penting dalam menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Dalam teori agensi, kepemilikan institusional dapat menjadi solusi dalam mengatasi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dengan memperkuat fungsi monitoring terhadap perilaku manajer. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional memiliki kepentingan finansial yang signifikan serta reputasi yang perlu dijaga, mereka akan cenderung aktif dalam mengawasi kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang signifikan memberikan pengaruh besar dalam forum pertemuan para pemegang saham dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, sehingga dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja dan keputusan yang diambil manajemen. Dampaknya, potensi manipulasi atau kecurangan dalam laporan keuangan dapat diminimalisir atau dengan kata lain keberadaan kepemilikan institusional yang besar menjadi pondasi pertahanan dalam menjaga integritas laporan keuangan perusahaan.

Berbagai penelitian sebelumnya memberikan hasil yang mendukung argumen penelitian ini mengungkapkan bahwa, kepemilikan institusional memiliki peran pengawasan eksternal dalam sistem tata kelola perusahaan, sehingga mampu meminimalkan manipulasi melalui mekanisme pengawasan dan pengaruhnya terhadap perilaku manajemen (Ramos Montesdeoca *et al.*, 2019). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia (Putri dan Purnamasari, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa peningkatan peran kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan selaras dengan peningkatan efektivitas pemantauan terhadap kinerja dan keputusan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Efektivitas pengawasan tersebut secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat kecurangan laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan teori agensi serta hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini digunakan karena dapat menggambarkan hubungan antar berbagai variabel yang diteliti melalui pengolahan data secara sistematis dan statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan (*annual report*) perusahaan BUMN selama periode 2020-2024.

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan BUMN pada periode 2020-2024. Sampel penelitian ini adalah perusahaan BUMN berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun berbagai kriteria sampel sebagai berikut :

1. Perusahaan BUMN Non-keuangan tahun 2020 hingga 2024
2. Perusahaan BUMN yang melaporkan laporan keuangan lengkap berturut – turut dari tahun 2020 hingga 2024
3. Perusahaan BUMN yang memiliki kelengkapan data variabel penelitian secara berturut – turut selama periode 2020 hingga 2024

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data seperti studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan guna memperluas wawasan peneliti serta membantu dalam merumuskan serta membangun hipotesis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam studi pustaka meliputi literatur seperti buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian.

Sementara itu, metode dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan guna mendukung kesimpulan penelitian. Jenis data dokumentasi yang digunakan ialah laporan keuangan (*annual report*) tahunan perusahaan BUMN selama periode 2020-2024.

### 3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel

#### 3.4.1 Variabel Dependen ( Kecurangan Laporan Keuangan)

Kecurangan laporan keuangan ialah penyajian dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh tindakan manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan-catatan akuntansi yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen (Mark F *et al.*, 2017). Guna mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu alat analisis yang mampu mengidentifikasi indikasi kecurangan secara kuantitatif dengan memanfaatkan data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan model Beneish M-Score, yang merupakan model statistik yang dikembangkan oleh Beneish untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi laba melalui delapan rasio keuangan yang mencerminkan kinerja, kualitas laba, dan kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian Beneish (1999) serta diperkuat oleh penelitian Nugroho & Diyanty (2022), interpretasi model ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan nilai M Score lebih dari -2,22 dikategorikan terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan, sedangkan perusahaan dengan nilai M Score kurang dari -2,22 dikategorikan tidak terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan. Berikut model Beneish M-Score :

$$\text{M-Score} = -4,84 + 0,920 \text{ DSRI} + 0,528 \text{ GMI} + 0,404 \text{ AQI} + 0,892 \text{ SGI} + 0,115 \text{ DEPI} - 0,172 \text{ SGAI} + 4,679 \text{ TATA} - 0,327 \text{ LVGI}$$

##### 1. *Days Sales in Receivable Index (DSRI)*

Rasio DSRI mengukur perubahan proporsi piutang usaha terhadap penjualan dari periode tahun sebelumnya hingga periode berjalan. Nilai DSRI

yang besar mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan piutang usaha lebih cepat dibandingkan penjualan. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya pengakuan atau pencatatan pendapatan yang tidak wajar atau penjualan fiktif (tidak pernah terjadi). Rumus DSRI yakni :

$$DSRI = \frac{Piutang\ Usaha(t)/Penjualan(t)}{Piutang\ Usaha(t-1)/Penjualan(t-1)}$$

## 2. *Gross Margin Index (GMI)*

Rasio GMI mencerminkan perubahan margin laba kotor perusahaan. Nilai GMI yang tinggi menunjukkan bahwa terjadinya penurunan margin laba kotor pada periode berjalan. Kondisi ini dapat menandakan bahwa manajemen melakukan tindakan manipulasi laba dengan tujuan untuk menjaga atau mempertahankan performa keuangan perusahaan agar terlihat tetap baik dan stabil dipandangan investor. Rumus GMI yakni :

$$GMI = \frac{Laba\ Kotor\ (t-1)/Penjualan(t-1)}{Laba\ Kotor(t)/Penjual(t)}$$

## 3. *Aset Quality Index (AQI)*

Rasio AQI mengukur perubahan kualitas aset perusahaan. Peningkatan nilai AQI menunjukkan bahwa meningkatnya proporsi aset tidak lancar selain aset tetap. Kondisi ini dapat menjadi indikasi perusahaan mengapitalisasi biaya (menunda pengakuan beban) untuk meningkatkan laba. Rumus AQI yakni :

$$AQI = \frac{1-Aktiva\ Lancar\ (t)+Aktiva\ Tetap(t)/TotalAktiva(t)}{1-Aktiva\ Lancar(t-1)+Aktiva\ Tetap(t-1)/TotalAktiva(t-1)}$$

## 4. *Sales Growth Index (SGI)*

Rasio SGI memiliki fungsi untuk menilai tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat memberikan tekanan bagi manajemen, hal tersebut berpotensi mendorong praktik manipulasi laba ketika kinerja perusahaan mulai menurun. Rumus SGI yakni :

$$SGI = \frac{Penjualan(t)}{Penjualan(t-1)}$$

### 5. *Depreciation Indeks (DEPI)*

Rasio DEPI mengindikasikan perubahan kebijakan penyusutan aset atau memperlambat pengakuan penyusutan. Nilai yang tinggi dapat menunjukkan indikasi manipulasi. Rumus DEPI yakni :

$$DEPI = \frac{Depresiasi(t-1)/(Depresiasi(t-1)+Aktiva Tetap(t-1))}{Depresiasi(t)/(Depresiasi(t)+Aktiva Tetap(t))}$$

### 6. *Sales, General, and Administrative Expenses Indeks (SGAI)*

Rasio SGAI mengukur efisiensi biaya operasional perusahaan. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa biaya operasional tumbuh lebih cepat dibandingkan penjualan, yang dapat menjadi sinyal menurunnya kinerja operasional dan meningkatkan peluang manajemen untuk memanipulasi laba. Rumus SGAI yakni:

$$SGAI = \frac{Beban Penjualan\&Administrasi(t)/Penjualan(t)}{Beban Penjualan\&Administrasi(t-1)/Penjualan(t-1)}$$

### 7. *Leverage Indeks (LVGI)*

Rasio LVGI mengukur perubahan tingkat leverage perusahaan. Kenaikan tingkat leverage dapat menjadi tekanan bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian utang, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Rumus LVGI yakni :

$$LVGI = \frac{Total Hutang(t)/Total Aset(t)}{Total Hutang(t-1)/Total Aset(t-1)}$$

### 8. *Total Accruals to Total Assets (TATA)*

Rasio TATA mengukur besaran akrual dalam laba yang dihasilkan perusahaan. Ketika nilai TATA menunjukkan angka yang besar, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar laba perusahaan berasal dari akrual dan bukan dari arus kas operasional, yang dimana sering dikaitkan dengan kualitas laba yang rendah dan potensi manipulasi laporan keuangan. Rumus TATA yakni :

$$TATA = \frac{Laba Tahun Berjalan(t)-Arus Kas Operasi(t)}{Total Aset(t)}$$

### 3.4.2 Variabel Independen

#### 3.4.2.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki ikatan atau hubungan kepentingan dengan perusahaan, pihak pengelola, maupun pemilik saham. Keberadaan dewan komisaris independen memiliki fungsi strategis dalam sistem *corporate governance*, yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen secara netral untuk meminimalisir potensi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Menurut Nurfaza *et al.* (2017), dewan komisaris independen diukur dengan rumus :

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

#### 3.4.2.2 Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal perusahaan yang memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam menjamin integritas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Komite audit diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen. Komite audit diukur dengan rumus sebagai berikut menurut Syafaatul, (2014) :

$$KA = \frac{\text{Jumlah komite audit independen}}{\text{Total komite audit}}$$

#### 3.4.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh berbagai institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Para pemilik saham biasanya memiliki kemampuan analisis dan pengawasan yang lebih memadai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Kondisi tersebut menjadikan mereka mampu berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif dalam menghindari tindakan-tindakan manipulatif, termasuk kecurangan laporan keuangan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan eksternal terhadap kinerja manajemen, karena institusi memiliki sumber daya

yang memadai untuk melakukan pemantauan terhadap setiap aktivitas manajerial yang dilaksanakan dalam perusahaan (Cornett *et al.*, 2008). Menurut Nurfaiza *et al.* (2017), kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diteliti seperti rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel (Nazaruddin & Basuki, 2015).

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah model regresi linier berganda yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar. Adapun jenis-jenis uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

##### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model terdistribusi normal. Pengujian normalitas ini dilakukan menggunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov*. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

- a. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig.) > 0,05, maka  $H_0$  diterima, artinya data residual berdistribusi normal.
- b. b. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig.) < 0,05, maka  $H_0$  ditolak, artinya data residual tidak berdistribusi normal.

##### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam estimasi koefisien regresi. Pengujian

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

- Jika nilai VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- Jika nilai VIF  $\geq 10$ , maka terjadi multikolinearitas dan variabel tersebut sebaiknya dikeluarkan dari model regresi untuk menghindari bias.

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu dengan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan *scatterplot*, yaitu dengan melihat pola sebar titik-titik antara nilai prediksi (ZPRED) dan residual (SRESID). Kriteria penilaian adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

- Jika pola titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Jika pola titik membentuk pola tertentu (misal: menyempit atau melebar), maka terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara residual saat ini dengan residual sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson Test (DW Test). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai Durbin-Watson adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2022):

- Tidak terjadi autokorelasi jika ( $du < DW < 4du$ )
- Terjadi autokorelasi positif jika ( $DW < dl$ )
- Terjadi autokorelasi negatif jika ( $4-dl < DW < 4$ )
- Tidak dapat disimpulkan jika ( $dl < DW < du$ ) atau antara ( $4-du$ ) dan ( $4-dl$ )

### 3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : M-Score
- A : Konstanta
- $\beta_1$ – $\beta_4$  : Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X1 : Komisaris Independen
- X2 : Komite Audit
- X3 : Kepemilikan Institusional
- E : Standar error (tingkat kesalahan)

### 3.5.4 Uji Hipotesis

#### 3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2019), koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama dalam model regresi. Adapun kriteria pengambilan keputusan :

- Jika nilai  $R^2$  mendekati 1, maka model regresi dikatakan baik, karena variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
- Jika nilai  $R^2$  mendekati 0, maka model regresi dikatakan kurang baik karena variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi variabel dependen.

#### 3.5.4.2 Uji F

Menurut Sugiyono (2019), uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, yaitu apakah seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah :

- Jika nilai signifikansi (Sig.)  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi (Sig.)  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### **3.5.4.3 Uji t**

Menurut Sugiyono (2019), uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam model regresi. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah :

- Jika nilai signifikansi (Sig.)  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi (Sig.)  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian ini, *good corporate governance* yang diukur melalui tiga variabel seperti, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, sedangkan kecurangan laporan keuangan diukur menggunakan Beneish M-Score. Metode analisis yang diterapkan meliputi analisis statistik deskriptif yang berfungsi untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data penelitian, yang didukung oleh uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model penelitian serta pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F. Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dijalankan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hipotesis pertama, variabel komisaris independen (KI) yang diukur berdasarkan proporsinya menghasilkan temuan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis pertama yang diajukan peneliti tidak terdukung.
2. Hipotesis kedua, variabel komite audit (KA) yang diukur berdasarkan proporsinya menghasilkan temuan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis kedua yang diajukan peneliti tidak terdukung.
3. Hipotesis ketiga, variabel kepemilikan institusional (Kep.Ins) yang diukur berdasarkan persentase kepemilikannya menghasilkan temuan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis ketiga yang diajukan peneliti tidak terdukung.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai masukan berharga bagi peneliti berikutnya, diantaranya :

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan BUMN periode 2020-2024. Pemilihan sampel yang terbatas pada sektor BUMN ini dapat menyebabkan hasil penelitian belum dapat dijadikan acuan secara keseluruhan terhadap perusahaan-perusahaan di sektor lain. Karakteristik yang unik dalam BUMN seperti kepemilikan mayoritas oleh pemerintah dan struktur pengawasan yang berbeda dengan perusahaan swasta maupun sektor lainnya, dapat mempengaruhi hubungan antara variabel GCG dengan kecurangan laporan keuangan.
2. Pada penelitian ini, pengukuran tingkat kecurangan laporan keuangan hanya menggunakan metode Beneish M Score. Meskipun metode ini banyak digunakan dalam penelitian terdahulu, namun indikator ini bersifat belum pasti dan tidak secara langsung menunjukkan adanya kecurangan yang terbukti secara hukum. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kondisi kecurangan laporan keuangan secara menyeluruh.
3. Pada penelitian ini melakukan *outlier* data sampel untuk memenuhi syarat tahapan awal pengujian asumsi klasik. Penghapusan data ekstrem dapat memiliki beberapa keterbatasan seperti, berkurangnya jumlah sampel yang digunakan serta mungkin saja data yang dihapus memiliki informasi penting mengenai karakteristik tertentu.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai keterbatasan yang telah dipaparkan, peneliti menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya, perusahaan, dan pihak terkait lainnya, diantaranya :

1. Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti berikutnya perlu mempertimbangkan perluasan cakupan objek

penelitian dengan tidak membatasi hanya pada entitas perusahaan BUMN saja. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap. Di samping itu, peneliti berikutnya juga dapat mempertimbangkan indikator lain dalam mengukur tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, seperti menggunakan analisis fraud hexagon ataupun dengan metode kualitatif seperti pernyataan opini audit maupun kasus pelanggaran yang dipublikasikan oleh OJK.

## 2. Bagi Perusahaan

Disarankan untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat formal yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan saja, melainkan juga pada pengoptimalan kualitas dan efektivitas pelaksanaannya. Perusahaan perlu memperkuat peran GCG, tidak hanya memastikan jumlah anggota yang memadai tetapi juga kompetensi di bidangnya serta intensitas pengawasan yang lebih aktif terhadap proses pelaporan keuangan. Dengan pengawasan yang lebih optimal, perusahaan diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

## 3. Bagi Pemerintah

Disarankan untuk tidak hanya berfokus pada struktur *good corporate governance* saja, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap implementasinya secara substansial. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyempurnaan kebijakan terkait efektivitas peran dewan komisaris independen, komite audit, dan investor institusional. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan mengurangi praktik kecurangan laporan keuangan, khususnya pada perusahaan BUMN.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>
- ACFE. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations* (13th ed.). <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Alabdullah, T. T. Y., & Sofri, Y. (2022). The impact of institutional investors' investment horizons on financial reporting quality. *Journal of Governance and Regulation*, 11(3), 138–150.
- American Institute of Certified Public Accountants. (2002). *Statement on Auditing Standards No. 99: Consideration of fraud in a financial statement audit*. AICPA.
- Amri, F. F., & Puttri, A. P. (2023). *Corporate Governance dan Kecurangan Laporan Keuangan: Studi pada Perusahaan BUMN*. <https://jkaa.bunghatta.ac.id/index.php/JKAA/article/view/144>
- Anastasia, P. N., Rahayu, M., & Nursina, N. (2023). *Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan*. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/3151>
- Anisykurlillah, I., Mukhibad, H., Jati, K. W., Rizkyana, F. W., Nurkhin, A., & Hapsoro, B. B. (2025). Audit committee attributes and financial statement fraud risk: Evidence from Indonesian banks. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2566443. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2566443>
- Arum, E. D., Widyastuti, U., & Nugroho, B. A. (2023). Ownership structure, audit committee characteristics, and earnings management: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, Emerald Publishing, Vol. 30 No. 1, pp. 105–124. <https://doi.org/10.1108/JABES-10-2022-0102>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. (2022). *Survei Fraud Indonesia 2022*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2025). *Survei Fraud Indonesia 2025*. ACFE Indonesia. <https://acfe-indonesia.or.id/survey-fraud-indonesia-2025/>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024, Mei 20). *Gaji karyawan tak dibayar, begini liciknya Indofarma manipulasi laporan keuangan*. BPK Perwakilan

Kalimantan Timur. <https://kaltim.bpk.go.id/gaji-karyawan-tak-dibayar-begini-liciknya-indofarma-manipulasi-laporan-keuangan/>

- Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, 71(4), 443–465. <https://www.jstor.org/stable/248566>
- Beneish, M. D. (1999). The detection of earnings manipulation. *Financial Analysts Journal*, 55(5), 24–36. <https://doi.org/10.2469/faj.v55.n5.2296>
- Christian, N., Basri, Y. Z., & Arafah, W. (2019). Analysis of fraud pentagon to detecting corporate fraud in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 3(8). [https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2020/IJEBMR\\_420.pdf](https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2020/IJEBMR_420.pdf)
- Cornett, M. M., Marcus, A. J., Saunders, A., & Tehranian, H. (2008). The impact of institutional ownership on corporate operating performance. *Journal of Banking & Finance*, 31(6), 1771–1794.
- Dewi, K., & Utama, S. (2022). The effect of corporate governance on financial statement fraud in Indonesian companies. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 345–358. <https://doi.org/10.18202/jamal.2022.04.13020>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.1002/9781118266298.ch7>
- Fahira, N., Andriani, N., & Sugiarti, I. (2023). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Implementasi Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud pada PT Barru Barakah Properti*. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/malomo/article/view/3717>
- Fama, E. F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. *Journal of Political Economy*, 88(2), 288–307.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Guritno, D. P., Probowulan, D., & Maharani, A. (2020). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Variabel Corporate Governance. *Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 1–10.
- Handayani, F., & Sugiarto, T. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI)*, 19(2), 157–169. <https://doi.org/10.21002/jaki.v19i2.2022.157>
- Handoko, B. L. (2021). Fraud hexagon dalam mendeteksi financial statement fraud perusahaan perbankan di Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(2), 176–192.

- Hermawan, A. A. (2009). Struktur Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Pengujian Model Interaksi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 24(1), 1–18.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan . Jakarta: IAI.
- Imron Ritonga, M., Zulfikar, R., & Mahmudah, N. (2023). Efektivitas Komite Audit dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada BUMN. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 88–102. <https://doi.org/10.18202/jram.v14i1.2023.088>
- Indiraswari, S. D., Subroto, B., Rosidi, R., & Subekti, I. (2025). Corporate governance and financial statement fraud: Evidence on the moderating influence of financial distress. *Problems and Perspectives in Management*, 23(2), 785–795. [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(2\).2025.57](https://doi.org/10.21511/ppm.23(2).2025.57)
- Indrati, M., Putri, A. R., & Wijayanti, S. (2021). Pengaruh komite audit, dewan komisaris, dan kualitas audit terhadap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 123–140.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2021). *ISA 240: The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements*. New York: IFAC. <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISA-240-Revised.pdf>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaawaase, T. K., Nairuba, C., Akankunda, B., & Bananuka, J. (2021). Corporate governance, internal audit quality and financial reporting quality of financial institutions. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(3), 348–366. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0117>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG. Tersedia di: <http://www.knkg-indonesia.org>
- Kusuma, H., & Pramono, R. (2020). Agency problems and fraudulent financial reporting: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 153–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.08>
- Kusumosari, L., & Rahardjo, S. N. (2023). Audit Committee Effectiveness as Fraud Prevention Mechanisms. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 8(2), 1602–1623. <https://doi.org/10.20473/jraba.v8i2.51157>
- Lestari, P., & Wibowo, S. (2023). The role of F-score in detecting financial statement fraud: Evidence from ASEAN countries. *Asian Economic and Financial Review*, 13(4), 312–326. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i4.4821>

- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance* (R. Hamidawati N (ed.)). PT ERA ADICITRA INTERMEDIA.
- Mark F, Z., Conan C, A., W. Steven, A., dan Chad O, A. 2017. *Forensik Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nasir, N. A. B. M., Ali, M. J., & Ahmed, K. (2019). Corporate governance, board ethnicity and financial statement fraud: Evidence from Malaysia. *Accounting Research Journal*, 32(3), 514–531. <https://doi.org/10.1108/arj-02-2018-0024>
- Nasir, N. A. M., & Hashim, H. A. (2021). Corporate governance performance and financial statement fraud: Evidence from Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 1–13. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0182>
- Nindito, M., Avianti, I., Koeswayo, P. S., & Tanzil, N. D. (2025). Guardians of integrity: Exploring the role of corporate governance in preventing financial statement fraud. *Journal of Governance & Regulation*, 14(1), 109–118. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1art10>
- Novianti, D., & Kurniawan, H. (2021). Corporate governance, agency theory, and financial statement fraud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 201–215. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i2.33024>
- Nugroho, D. S., & Diyanty, V. (2022). Hexagon fraud in fraudulent financial statements: The moderating role of audit committee. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 46–67. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.03>
- Nurfaza, BD, Gustyana, TT, & Iradianty, A. (2017). The Effect of Good Corporate Governance on Company Value (Study on the Banking Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-2015).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta:OJK.<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/regulasi/Pages/POJK-Nomor-55-POJK.04-2015.aspx>
- Peraturan Menteri BUMN. (2023). *Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN*. Jakarta:KementerianBUMN. <https://jdih.bumn.go.id/produk/peraturan-menteri-bumn-nomor-per-2mbu032023>

- Persons, O. S. (2005). The relation between the new corporate governance rules and the likelihood of financial statement fraud. *Review of Accounting and Finance*, 4(2), 125–148. <https://doi.org/10.1108/eb043426>
- Pinto dos Santos, J. M. (2021). Financial knowledge for corporate boards: What should board members know? *Independent Journal of Management & Production*, 12(1), 265–281. <https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i1.1339>
- Prasetyo, A., & Santoso, B. (2021). The effect of audit committee effectiveness on financial reporting quality. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 85–102. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.05>
- Probohudono, A. N., Lubis, A. T., Nahartyo, E., & Arifah, S. (2022). Governance structure and the tendency to do financial statements fraud. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 57–69. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art6>
- Puspitasari, Y., & Meiranto, W. (2020). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 155–172.
- Putri, N. S., & Purnamasari, D. (2022). *Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2), 89–98.
- Ramos Montesdeoca, M., Sánchez Medina, A. J., & Blázquez Santana, F. (2019). Research topics in accounting fraud in the 21st century: A state of the art. *Sustainability*, 11(6), Article 1570. <https://doi.org/10.3390/su11061570>
- Rasyidah, N., Aulia, D., & Hardiansyah, D. (2024). Fraud Hexagon Analysis on State-Owned Enterprises in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JIAKI)*, Vol. 21 No. 1, pp. 45–59.
- Rasyidah, U., Nursaid, F., & Lestari, N. D. (2024). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Praktik Fraud Laporan Keuangan di Perusahaan BUMN. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 28(1), 44–58. <https://doi.org/10.24843/JAAI.2024.v28.i01.p04>
- Rumapea, M., Elisabeth, D. M., & Monica, D. (2022). Pengaruh kepemilikan manajerial, karakteristik komite audit, ukuran perusahaan dan leverage terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 136–144. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol5no2.pp136-144>
- Saleh, N. M., Iskandar, T. M., & Rahmat, M. M. (2007). Audit Committee Characteristics and Earning Management: Evidence from Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 15(2), 147–163.
- Santoso, I., & Purnamasari, E. (2022). Simplifying F-score for emerging markets: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(4), 621–640. <https://doi.org/10.1108/JFRA-11-2021-0362>

- Sari, P. N., & Husadha, C. (2020). Pengungkapan corporate governance terhadap indikasi fraud dalam pelaporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 16(1), 46–56.
- Sembiring, H., & Zulvia, N. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 112–121.
- Setiawan, I., & Sari, R. N. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap financial statement fraud pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 245–260.
- Setiawan, R., Halim, A. D., & Amalia, O. H. (2023). Proporsi komisaris independen, diversitas komisaris independen, dan nilai perusahaan. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 230–243.
- Siregar, S. V., & Utama, S. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 76–89.
- Siregar, T., Putri, A., & Lestari, H. (2022). The role of financial statements in public accountability. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.24034/jak.v14i1.3021>
- Skousen, C. J., & Twedt, B. J. (2009). Fraud score analysis in emerging markets. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 16(3), 301–316. <https://doi.org/10.1108/13527600910977373>
- Suaryana, I. G. N. A. (2023). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Udayana*, 18(1), 45–57.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, K., Astuti, S., & Zuhrotun. (2019). *The role of risk management and good governance to detect fraud financial reporting*. 1(1), 38–46. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art4>
- Suryaningrum, D., Yuliawati, I., & Ramadhan, M. A. (2023). Kepemilikan Institusional dan Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 255–270. <https://doi.org/10.32528/jiak.v12i3.2023.255>
- Susanto, A., & Pradipta, A. D. (2021). *Audit Committee Characteristics and Financial Statement Fraud: Empirical Evidence from Indonesia*. *Journal of Accounting Research*, 6(1), 78–90.
- Syafitri, M., Ermaya, H. N., & Putra, A. (2021). Dampak corporate governance, financial stability, dan financial target dalam kecurangan laporan keuangan. *JURNAL AKUNIDA*, 7, 44–59.

- Tan, Angelina, N., & Anis, C. (2022). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen , Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–13.
- Tempo.co. (2024). *Mantan Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot Ariyono didakwa menerima suap dan memfasilitasi pelolosan RKAB PT Timah tahun 2019 yang memfasilitasi penambangan ilegal*. <https://www.tempo.co/hukum/mantan-dirjen-minerba-esdm-bambang-gatot-ariyono-didakwa-terima-suap-dan-fasilitas-dalam-korupsi-timah-1188618>
- Tempo.co. (2025, Mei 13). *Rincian dugaan proyek fiktif PT Telkom senilai Rp 431,7 miliar yang diusut Kejati Jakarta*. <https://www.tempo.co/hukum/rincian-dugaan-proyek-fiktif-pt-telkom-senilai-rp-431-7-miliar-yang-diusut-kejati-jakarta-1423978>
- Triyani, O., Kamalia, & Azwir. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi*, 27(1), 27–36. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/7890/6797>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis peran sistem pengendalian internal dan good corporate governance dalam upaya pencegahan fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>.
- Utama, S., & Syafruddin, M. (2023). The Impact of Managerial Ownership on Financial Fraud with Auditor Quality as Moderation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 14 No. 2, 2023, pp. 278–294
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2022). Good Corporate Governance dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7257369>
- Widianingsih, R., & Setiawan, D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Independensi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 101–110.
- Widyastuti, S., & Pamungkas, I. D. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 101–112.
- Wijaya, N. C., Rispanyo, & Kristianto, D. (2023). Pengaruh Komite Audit Independen, Keahlian Keuangan Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 19(2), 133–140.
- Yulinda, F., & Ridwan, M. (2020). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 245–258. <https://doi.org/10.30871/jrak.v8i2.1964>